

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. 2001. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Marlang, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: ASPublishing.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2016. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Surakarta: Kencana.
- Ahmad Fauzan. 2005. *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Anonim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danrivanto. 2018. *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Pemasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajlurrahman Jurdi, dkk. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Rangkang Education.

- H.R. Otje Salman S. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muh. Erwin. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peter Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Jurnal

- Agrio. Novie. dan Neni. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon*. Jurnal Eksekutif Vol.2 No.2.

- Dinda Narassati, Yonathan Pamungkas, dan Illona Novira. 2021. *Konsep e-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis e-Justice dan Aktualisasinya di Indonesia*. Jurnal Legislatif Vol. 4 No.2 Juni.
- Helmanida. 2011. *Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum*. Majalah Simbur Cahaya No. 45 Tahun XVI. 2011.
- Khotib Iqbal, Aris Priyadi, dan Elly Kristiani. 2020. *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (e-Court) dan Kajian Konvensional*. Batulis Civil Law Review Vol. 1 No. 1.
- M. Shoim. 2011. *Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 40 No.1.
- Ridho Awalanada dan Emmilia Rusdiana. 2019. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas*. Novum: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 3.
- Rizqy Zahrotul Wardah, dkk. 2020. *Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Pasuruan*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 4.
- Zil Aidi. 2020. *Implementasi e-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Perdata yang Efektif dan Efisien*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 49 No.1.

#### Website

- Abdullah. *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*. 2017. (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>. diakses pada 23 September 2021)
- Achmad Sahuri, *Penerapan e-Court di Berbagai Negara Studi Perbandingan Dalam Rangka Pengembangan Penerapan e-Court di Indonesia*. 2019. (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-e-court-di-berbagai-negara-studi-perbandingan-dalam-rangka-pengembangan-penerapan-e-court-di-indonesia-oleh-achmad-sahuri-s-sy-8-4>. diakses pada 19 Maret 2022)

Aida Mardatillah. *44 Pengadilan Percontohan Bakal Terapkan e-Litigation*. Hukumonline.

(<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5d492dbc4fd5f/44-pengadilan-percontohan-bakal-terapkan-e-litigation?page=all>. diakses pada 10 Oktober 2021)

A. S. Pudjoharsoyo. *Materi Presentasi "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. 2019. [http://www.pn-medankota.go.id/v3/images/sosialisasi\\_elitigasi\\_112019/Arah\\_Kebijakan\\_Teknis\\_Pemberlakuan\\_Pengadilan\\_Elektronik\\_OK.pptx](http://www.pn-medankota.go.id/v3/images/sosialisasi_elitigasi_112019/Arah_Kebijakan_Teknis_Pemberlakuan_Pengadilan_Elektronik_OK.pptx). diakses pada 19 September 2021)

*e-Court* mahkamah agung untuk Pengadilan Negeri Makassar. (<http://ecourt.pn-makassar.go.id> diakses pada 10 Oktober 2021)

Mahkamah Agung RI. 2019. *Buku Panduan e-Court*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta.

Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah. *Urgensi Penerapan e-Litigasi Terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara*. (<https://www.pa-kebumen.go.id/artikel-pa/259-urgensi-penerapan-e-litigasi-terhadap-percepatan-penyelesaian-perkara>. diakses pada 23 September 2021)

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, *e-Court Dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia*. 2019. (<https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>. diakses pada 19 Maret 2022)

R. Hidayat. *MA Harus Fokus Pembentukan Pelayanan Publik di Pengadilan*. Hukumonline.

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus-pembentukan-pelayanan-publik-di-pengadilan/>. diakses pada 30 Juli 2021)

### Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.